

PENGARUH TATA KELOLA PERBANKAN TERHADAP KINERJA KEUANGANNYA PADA SAAT PANDEMI

Dewi Sri

dewi_sri@ukmc.ac.id

ABSTRAKSI

Pandemi Corona telah melumpuhkan perekonomian berbagai negara di dunia. Banyak larangan tidak melakukan kegiatan umum di luar rumah dan berbagai kecemasan akibat ketakutan akan bahayanya penyakit itu. Kelumpuhan aktivitas ekonomi berdampak pada sektor perbankan. Rendahnya perputaran uang menyebabkan rendahnya kinerja keuangan pada sektor ini pula. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian terhadap pengaruh tata Kelola yang dilakukan di sektor perbankan terhadap kinerja keuangannya pada masa pandemik. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa tata kelola baik yang dilakukan oleh Komite Independen, Komite audit, maupun komite independen sangat mempengaruhi kinerja keuangan sektor perbankan di Indonesia pada masa pandemik Corona.

Kata kunci: Tata kelola, akuntabilitas, transparansi

ABSTRACT

The Corona pandemic has paralyzed the economies of various countries in the world. There are many prohibitions against doing public activities outside the home and various worries due to fear of the dangers of the disease. The paralysis of economic activity has had an impact on the banking sector. The low velocity of money causes low financial performance in this sector as well. In this study, research will be carried out on the influence of governance carried out in the banking sector on its financial performance during a pandemic. The results of this research that good governance carried out by the Independent Committee, the audit committee, and the independent committee greatly influenced the financial performance of the banking sector in Indonesia during the corona pandemic

Keywords: Governance, accountability, transparency

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan yang pesat di dekade terakhir seolah terhempas dengan datangnya pandemi Corona. Persaingan antar perbankan yang semula dipicu oleh derasnya perekonomian tidak lagi menjadi motif. Kelumpuhan perekonomian menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan bagi pihak manajemen. Banyak usaha berguguran karena tidak kuat menahan kevakuman masa pandemik.

Persaingan bank semakin ketat menjadi persaingan antara hidup dan matinya sektor perbankan. Persaingan yang sengit di pasar perbankan menghasilkan dinamika yang menggetarkan, mendorong bank-bank untuk mengejar efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Kelangsungan hidup sebuah perusahaan atau bank sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam mengelola perusahaan dengan baik, atau *corporate governance* yang diterapkan. Menurut pendapat Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *good corporate governance* bukan hanya sebuah mekanisme pengawasan dan pengaturan perusahaan, tapi menciptakan sebuah keseimbangan yang dinamis antara pengelolaan perusahaan dan berbagai pihak yang terlibat (*hard definition*), serta mengutamakan nilai yang tercermin dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri. Di bidang perbankan, *good corporate governance* mengacu pada penegakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 yang mengubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 terkait Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Bank Umum. Dalam tata kelola perbankan, terdapat prinsip-prinsip fundamental diantaranya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan.

Peran *corporate governance* menjadi sangat penting dalam mempercepat efisiensi ekonomi, dengan mengintegrasikan berbagai interaksi yang terjadi antara manajemen perusahaan, pemegang saham, dewan komisaris, dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Lebih dari sekadar itu, *corporate governance* menciptakan kerangka yang memungkinkan penetapan tujuan perusahaan dan menjadi alat untuk memonitor kinerja dengan cermat (Darmawati, dkk., 2004).

Industri perbankan berada di bawah pengawasan ketat yang jauh lebih ketat dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai pijakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan suatu bank, dengan tujuan memberikan penilaian terhadap kesehatan bank tersebut, baik dalam keadaan yang positif maupun negatif.

Industri perbankan di Indonesia secara proaktif mengikuti dan menerapkan praktik manajemen laba dalam rangka melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Rahmawati dan Baridwan dalam penelitian mereka pada tahun 2006. Pendapat Setiawati dan Na'im (2001) menunjukkan jika laporan keuangan yang telah dimanipulasi oleh manajemen bisa menyebabkan penyaluran modal yang tidak seimbang. Lebih dari itu, sektor perbankan merupakan sektor yang sangat bergantung pada "kepercayaan". Apabila investor kehilangan keyakinan karena adanya laporan keuangan yang tidak akurat akibat praktik manajemen laba, kecenderungan mereka adalah untuk menarik dana secara bersama-sama yang berpotensi menciptakan kepanikan finansial. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang dapat meminimalkan praktik

pengelolaan pendapatan oleh perusahaan perbankan. Satu opsi yang dapat diambil adalah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan sebagai opsi mekanisme yang efektif.

Tata kelola perusahaan muncul sebagai akibat dari pemisahan antara kepemilikan dan kendali bisnis, yang kerap dikenal sebagai isu agensi. Hubungan agensi antara pemilik modal dan manajer melibatkan tantangan bagi pemilik, dimana sangatlah krusial untuk memverifikasi bahwa modal yang dialokasikan tidak ditempatkan dalam proyek-proyek yang merugikan, sehingga menghambat pencapaian tingkat pengembalian yang diinginkan. Keberadaan *corporate governance* menjadi penting dalam upaya untuk mengatasi tantangan agensi antara pemilik modal dan manajer (Macey dan O'Hara, 2003).

Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep- 117/M-MBU/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2002, terdapat peraturan mengenai implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang harus diterapkan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara, tata kelola perusahaan menjadi landasan yang mengarahkan proses dan mekanisme pengelolaan suatu entitas dengan berpegang pada prinsip hukum dan etika bisnis.

Panduan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di sektor perbankan Indonesia, yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, pada tanggal 17 Oktober 2006 menggambarkan *good corporate governance* sebagai sebuah konsep yang terdiri dari lima prinsip utama. Prinsip-prinsip tersebut adalah keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kebebasan (*independence*), dan keadilan (*fairness*).

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 mengamanatkan penerapan prinsip-prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*) sebagai landasan *Good Corporate Governance* yang harus dijalankan oleh Bank Umum. Prinsip-prinsip tersebut membentuk dasar yang krusial dalam praktik tata kelola perusahaan yang efektif, dan gambaran singkat dari setiap prinsip tersebut.

Transparency merupakan prinsip penting dalam *good corporate governance* yang mencakup keterbukaan dalam penyampaian dokumen dan informasi terkait, serta transparansi dalam langkah pengambilan keputusan. Mempertahankan konsistensi dalam menyampaikan informasi yang komprehensif, presisi, dan tepat waktu terhadap para pemilik kepentingan (*stakeholder*) menjadi faktor penting dalam mencapai transparansi yang diinginkan oleh perusahaan. Adanya ketersediaan informasi yang memadai menjadi sangat krusial bagi investor dalam mengambil keputusan terkait risiko dan potensi keuntungan dari investasi mereka. Ketika laporan

keuangan tidak mencakup secara menyeluruh, pihak eksternal akan menghadapi kesulitan dalam mengevaluasi apakah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang mencukupi. Informasi yang terbatas akan menghambat kemampuan investor untuk mengestimasi nilai dan potensi kerugian, dan perubahan ekuitas perusahaan yang terjadi.

Prinsip *accountability* (akuntabilitas) melibatkan kejelasan dalam peran dan pelaksanaan tanggung jawab korporasi untuk mencapai pengelolaan yang efektif. Ketika prinsip *accountability* (akuntabilitas) diimplementasikan dengan baik, perusahaan dapat menghindari masalah keagenan dan konflik kepentingan. Dengan menerapkan akuntabilitas secara efektif, perusahaan dapat menjaga transparansi, integritas, dan kualitas pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pengaturan yang jelas mengenai pembagian kekuasaan antara manajer yang memimpin operasional harian dan pemegang saham yang direpresentasikan oleh dewan direksi. Dewan direksi memiliki peran penting dalam menetapkan pengawasan dan pengendalian yang efektif, sehingga menjaga akuntabilitas dalam organisasi. Dalam struktur ini, manajer bertanggung jawab langsung dalam menjalankan tugas sehari-hari, sementara dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memastikan terhindarnya kesalahan.

Pertanggungjawaban melibatkan kepatuhan dan ketaatan penerapan prinsip-prinsip dalam pengelolaan perusahaan yang etis dan peraturan hukum yang berlaku. Peraturan tersebut meliputi berbagai hal, termasuk perpajakan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, standar upah, serta persaingan yang sehat. Dengan menjunjung tinggi pertanggungjawaban, perusahaan tidak hanya menunjukkan komitmen dalam menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang etis, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya mendorong keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga memprioritaskan kesejahteraan *stakeholder* dan mendorong kemajuan dalam skala sosial yang lebih luas.

Independensi, juga dikenal sebagai kemandirian, merupakan kondisi di mana sebuah perusahaan dioperasikan secara profesional, terlepas dari konflik kepentingan, dan tidak terpengaruh atau ditekan oleh pihak manapun yang melanggar peraturan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip kekuatan perusahaan yang sehat merupakan tindakan yang tidak sesuai. Kemandirian memegang peran yang sangat signifikan dalam proses pengambilan keputusan yang krusial. Ketika kebebasan dan kemandirian terabaikan dalam pengambilan keputusan, objektivitas dalam proses tersebut dapat terpengaruh. Dengan menjaga independensi, perusahaan dapat menghasilkan keputusan yang terbebas dari pengaruh eksternal yang tidak sehat,

sehingga memastikan integritas, transparansi, dan keberlanjutan keputusan yang diambil.

Keadilan, yang juga dikenal sebagai *fairness*, melibatkan implementasi hak-hak yang muncul bagi *stakeholder* dari kesepakatan dan peraturan hukum yang berlaku dengan cara yang adil dan setara. Dengan kata sederhana, kesetaraan mengacu pada menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan dalam menjalankan hak-hak semua pihak yang terlibat. Dalam pengelolaan perusahaan, penting untuk memberikan penekanan pada kesetaraan, terutama dalam perlakuan terhadap pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak kepemilikan dan ada sistem peraturan dan hukum yang diterapkan untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka. Dengan memastikan kesetaraan ini, perusahaan dapat membangun lingkungan yang adil, transparan, dan melindungi hak-hak semua *stakeholder*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada dasarnya, komisaris independen mempunyai tugas yang mirip seperti dewan komisaris. Namun, perbedaannya terletak di komisaris independen tidak berafiliasi/ berhubungan dengan anggota maupun pihak manapun sehingga komisaris independen dapat berperan sebagai mengawasi manajemen, perantara antara manajer internal perusahaan, serta memberi nasihat kepada manajemen senior. Keberadaan komisaris yang independen dapat memberikan pengendalian yang lebih baik terhadap fungsi pengawasan yang akan membawa dampak bagi kinerja keuangan. Hal ini relevan dengan Teori Agensi yang menyampaikan bahwa perusahaan memerlukan sebuah mekanisme yang dapat membantu perusahaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi kinerjanya, seperti komisaris independen. Berlandaskan riset Andrani (2018) dan Fitria & Yushita (2018), Dewi dan Putri (2019), dan Agatha, dkk (2020) memperlihatkan komisaris independen memiliki dampak yang positif dan penting terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, maka hipotesisnya sebagai berikut:

H1: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Komite audit dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari dewan komisaris yang berperan dalam mendukung dewan komisaris dalam melakukan pengontrolan, khususnya dalam hal keuangan. Komite audit memungkinkan pengelolaan perusahaan menjadi lebih efektif sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan dan rekayasa data-data yang dapat dilakukan oleh internal perusahaan. Selain itu, dengan adanya komite audit, maka penerapan berbagai prinsip dari tata kelola perseroan yang baik dapat dipenuhi dengan maksimal. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan merupakan output dari penerapan prinsip tersebut. Jika tugas yang ada telah dilaksanakan secara efektif oleh komite audit serta jumlah komite

audit relevan dengan ketentuan yang berlaku, efektivitas manajemen dapat terpantau dengan baik serta permasalahan dapat diminimalkan. Hal ini sesuai dengan Teori Agensi untuk meminimalisir adanya kemungkinan kecurangan atau praktik-praktik menyimpang dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh internal perusahaan sehingga perusahaan memerlukan sebuah komite yang memang dibentuk khusus untuk memberikan pengawasan lebih terhadap kualitas laporan keuangan. Berlandaskan riset Dewi & Badjra (2017), Yuliani dan Sukirno (2018), Irma (2019) dan Agatha, dkk (2020) mengemukakan komite audit memiliki efek positif terhadap kinerja keuangan perseroan. Dengan demikian, maka hipotesisnya adalah :

H2 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh sebuah perusahaan institusi kecuali anak perusahaan serta perseroan yang memiliki hubungan istimewa. Semakin tinggi kepemilikan institusional dapat meminimalisir konflik keagenan yang menjadi masalah dasar dalam Teori Agensi. Hal ini dikarenakan semakin kuatnya pengawasan dan kontrol eksternal terhadap perseroan. Kepemilikan institusional memegang peran penting dalam memonitoring kinerja manajemen perseroan secara optimal. Kinerja manajemen perseroan yang optimal akan memberikan kinerja keuangan yang yang baik pula. Dengan adanya pengawasan tersebut, perusahaan akan semakin terdorong untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan kinerja yang terbaik agar menarik para calon pemegang saham yang menanamkan modalnya. Berlandaskan riset Dewi & Badjra (2017), Putri & Dewi (2019), Setiawan & Setiadi (2020), Agatha, dkk (2020) dan Subiyanto & Amanah (2022) mengemukakan kepemilikan institusional berimbas positif terhadap kinerja keuangan perseroan. Dengan demikian, maka hipotesisnya adalah

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

Riset ini melibatkan beberapa perusahaan di sektor perbankan yang tercatat di BEI dalam rentang waktu 2019-2021 sebagai populasi yang diteliti. Dalam proses pengambilan sampel, penelitian ini mengimplementasikan metode *purposive sampling* yang memastikan bahwa sampel yang dipilih mewakili populasi berlandaskan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Kriteria yang digunakan ialah perbankan yang telah menghasilkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara komprehensif selama rentang waktu 2019-2021 dan tetap terdaftar di BEI tanpa ada delisting selama periode tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memperoleh sampel yang relevan dan mewakili populasi dengan cermat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data

laporan keuangan perusahaan yang diperoleh secara sekunder dan laporan tahunan di sektor perbankan selama rentang waktu 2019-2021. Data tersebut dapat diakses baik melalui situs web resmi masing-masing perusahaan maupun melalui situs web <http://www.idx.co.id/>. Dengan memanfaatkan sumber data ini, penelitian dapat menggali informasi yang terperinci dan aktual mengenai kinerja perusahaan serta perkembangan industri perbankan selama periode waktu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ghozali (2011:160) menguraikan bahwa uji normalitas berguna untuk mengevaluasi apakah terdapat variabel pengganggu atau residu dalam model regresi mengikuti distribusi yang sesuai dengan asumsi normal. Terdapat dua alternatif yang tersedia untuk mengidentifikasi kenormalan data, yakni melalui analisis visual dan analisis statistik. Metode analisis statistik yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Dari uji Normalitas diperoleh bahwa dari 44 sampel perusahaan perbankan ditemukan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,890. Hal ini mengisyaratkan penggunaan data baik dan dapat dilanjutkan penelitiannya.

Pengujian multikolinieritas digunakan untuk menentukan apakah terdapat korelasi yang signifikan antara variabel bebas (variabel independen) dalam sebuah model regresi. Ghozali (2016) berpendapat bahwa model regresi yang ideal sepatutnya tidak mengindikasikan adanya korelasi yang signifikan antara variabel bebas (variabel independen). Apabila nilai VIF kurang dari 10 atau nilai toleransi lebih besar dari 0,01, dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat isu multikolinieritas dalam model regresi. Dari data yang diolah diperoleh bahwa $VIF < 10$ dan nilai *Tolerance*-nya $> 0,01$, yang berarti tidak terjadi multikolinieritas.

Pengujian heteroskedastisitas ditujukan untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan yang signifikan dalam variasi residual antara satu observasi dengan observasi lainnya. Uji heteroskedastisitas membantu mengidentifikasi apakah terdapat ketidaknyamanan varian residual yang mungkin terjadi pada suatu pengamatan jika dibandingkan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi tersebut. Homoskedastisitas terjadi ketika hasil pengamatan antara satu observasi dengan observasi lainnya memiliki variansi yang serupa. Model regresi dianggap baik jika memiliki homoskedastisitas, artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil analisis data, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas yang signifikan. Sehingga, kesimpulan yang dapat diadopsi adalah bahwa model regresi dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria homoskedastisitas dan dapat dianggap baik.

Uji Autokorelasi merupakan suatu pendekatan statistik yang digunakan untuk menilai apakah terdapat hubungan antara variabel dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Dalam konteks ini, jika asumsi autokorelasi terpenuhi dalam model prediksi, terdapat korelasi autokorelasi diantara nilai-nilai residual, sehingga mereka tidak lagi saling bebas secara independen. Dengan menggunakan uji Durbin Watson penilaian diperoleh dengan kriteria jika DW berada di -2 maka terjadi autokorelasi, apabila DW diantara -2 hingga $+2$ artinya tidak terjadi autokorelasi, namun apabila DW berada di $+2$ maka terjadi autokorelasi negatif. Tabel di atas nilai DW 1.929 berarti tidak terjadi autokorelasi.

Dari hasil analisis Uji F, didapatkan nilai signifikansi 0,019. Hal ini berarti diperoleh nilai kurang dari 0,05, t hitung $>$ t tabel mengindikasikan terdapat pengaruh variabel terikat dengan variabel bebas.

Variabel Komisaris Independen memperlihatkan tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000, berada di bawah ambang batas signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Di samping itu, dilakukan pula perbandingan antara nilai t -hitung dan nilai t -tabel. Dalam kasus ini, dengan nilai df (derajat kebebasan) = $n-k = 44-4 = 40$, nilai t -tabel yang relevan adalah 1,684. Hasilnya menunjukkan bahwa t -hitung sebesar $3,611 > 1,684$. Sebagai hasilnya, dapat disarikan bahwa variabel Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan, sehingga hipotesis H_1 dapat diterima.

Variabel Komite Audit memperlihatkan tingkat signifikansi sebesar 0,001, yang menandakan bahwa nilai tersebut lebih rendah dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Setelah itu, diukur perbandingan antara nilai t -hitung dan nilai t -tabel untuk melihat kesesuaian antara keduanya. Dalam hal ini, nilai t -hitung sebesar $3,541 > 1,684$. Ini menunjukkan bahwa variabel Komite Audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Oleh karena itu, hipotesis H_2 dapat diterima.

Variabel Kepemilikan Institusional menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang menunjukkan angka yang lebih rendah dari batas signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Setelah itu, diukur perbandingan antara nilai t -hitung dan nilai t -tabel untuk melihat kesesuaian antara keduanya. Dalam hal ini, nilai t -hitung sebesar $5,227 > 1,684$. Dapat ditafsirkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, hipotesis H_3 dapat diterima.

Berdasarkan temuan penelitian yang disampaikan, dapat dinyatakan bahwa semua hipotesis dalam penelitian ini terbukti valid. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap variabel independen yang diamati, yakni Komisaris Independen (X_1), Komite Audit (X_2), dan

Kepemilikan Institusional (X3), memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Kinerja Keuangan (Y). Dengan kata lain, penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor tersebut memegang peranan krusial dalam menentukan Kinerja Keuangan yang signifikan.

Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,386. Ini mengimplikasikan variabel-variabel independen memiliki pengaruh 38,6 persen terhadap variabel dependen. Dari sisi lain dapat diartikan bahwa ada 61,4 persen dipengaruhi oleh variabel independen lain di luar dari variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini.

Dalam rangka menguji kevalidan dugaan dalam penelitian ini, dilakukan analisis regresi linear berganda yang memberikan pemahaman yang mendalam. Persamaannya analisis regresi linear berganda yang dihasilkan adalah seperti sebagai berikut: $Y = -1,723 + 0,263X_1 + 0,245X_2 + 0,348X_3 + e$

Nilai konstanta (α) dalam persamaan regresi linear berganda memiliki tanda negatif, yaitu -1,723. Ini menunjukkan bahwa ketika nilai variabel independen adalah nol (0), maka nilai variabel dependen akan memiliki nilai negatif sebesar -1,723. Adanya nilai konstanta yang negatif ini dapat terjadi karena adanya asumsi yang memprediksi korelasi antara variabel dependen dan variabel independen ketika nilai variabel independen adalah nol. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam perhitungan koefisien regresi linear berganda, yang menjadi perhatian utama adalah koefisien *slope* (kemiringan) variabel independen, bukan nilai konstanta yang berkaitan dengan estimasi ketika nilai variabel independen adalah nol. Ini sesuai dengan konsep yang dijelaskan dalam studi oleh Medenhall & Sincich (2011:99). Dengan demikian, ketika variabel Komisaris Independen, Komite Audit, dan variabel lainnya memiliki nilai nol, maka nilai Kinerja Keuangan akan memiliki nilai sebesar -1,723.

Koefisien regresi untuk variabel Komisaris Independen (X1) memiliki nilai sebesar 0,263, yang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap minat penggunaan. Artinya, ketika Komisaris Independen meningkat, terdapat peningkatan dalam Kinerja Keuangan sebesar 0,263. Sebaliknya, jika terjadi penurunan dalam Komisaris Independen, maka akan terjadi penurunan sebesar 0,263 satuan dalam Kinerja Keuangan. Dengan kata lain, semakin meningkatnya kehadiran Komisaris Independen berpotensi meningkatkan Kinerja Keuangan, sementara penurunan kehadirannya dapat mempengaruhi penurunan Kinerja Keuangan sebesar 0,263 satuan.

Koefisien regresi untuk variabel Komite Audit (X2) memiliki nilai sebesar 0,245, yang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Dalam konteks ini, ketika Komite Audit mengalami peningkatan, terjadi peningkatan sebesar 0,245 dalam Kinerja Keuangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan dalam Komite Audit, itu berarti akan terjadi penurunan sebesar 0,245 satuan dalam

Kinerja Keuangan. Dengan kata lain, peningkatan kehadiran dan peran Komite Audit berpotensi meningkatkan Kinerja Keuangan, sementara penurunan kehadiran mereka dapat berdampak pada penurunan Kinerja Keuangan sebesar 0,245 satuan.

Koefisien regresi untuk variabel Kepemilikan Institusional (X3) memiliki nilai sebesar 0,348, yang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Dalam konteks ini, ketika Kepemilikan Institusional mengalami peningkatan, terjadi peningkatan sebesar 0,348 dalam Kinerja Keuangan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan dalam Kepemilikan Institusional, maka akan terjadi penurunan sebesar 0,348 satuan dalam Kinerja Keuangan. Dengan kata lain, semakin meningkatnya tingkat kepemilikan institusional berpotensi meningkatkan Kinerja Keuangan, sementara penurunan tingkat kepemilikan tersebut dapat berdampak pada penurunan Kinerja Keuangan sebesar 0,348 satuan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa tata Kelola baik yang dilakukan oleh Komite Independen, Komite audit, maupun komite independen sangat mempengaruhi kinerja keuangan sektor perbankan di Indonesia pada masa pandemik Corona. Saran untuk penelitian selanjutnya yakni untuk memisahkan dua periode waktu antara sebelum terjadinya pandemik Corona, serta saat terjadinya pandemik Corona.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, A. N. (2020, Juni 7). Selama pandemi, tingkat utilitas kapal Buana Lintas Laut (BULL) mencapai 95%. Retrieved from Kontan.co.id:<https://industri.kontan.co.id/news/selama-pandemi-tingkat-utilitas-kapal-buana-lintas-lautan-bull-mencapai-95>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendryadi. (2014, Juni 24). Konstanta Negatif ..Bagaimana ? Retrieved from Teori Online: <https://teorionline.wordpress.com/2014/06/24/konstanta-intercept-negatif-bagaimana/>
- Hidayat, R. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan . Jom Fekon, 1-15.
- Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. Jrka, 46-59.
- Mattiara, N. S., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Board Size dan Leverage Terhadap

- Kinerja Keuangan Pada Industri Keuangan Non Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. *Jurnal Emba*, 306- 316.
- Monica, S., & Dewi, A. S. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan di Bursa Efek Indonesia. *Osf*, 1- 15.
- MY. (2017, 06 20). Good Corporate Governance (GCG). Retrieved from <https://accounting.binus.ac.id/2017/06/20/good-corporate-governance-gcg/> Binus Accounting
- Nisa, R., & Arjuniadi. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekobismen*, 86- 102.